



KR-Surya Adi Lesmana

MENIKMATI ANGKRINGAN: Warga menikmati menu angkringan di pojok Tugu Pal Putih, Jalan Margo Utomo, Yogyakarta, Selasa (21/9). Mulai dibukanya sejumlah objek wisata turut berimbas pada menggeliatnya perekonomian pedagang kakilima maupun usaha kecil lain, salah satunya angkringan khas Jogja.

PPKM DIPERPANJANG HINGGA 4 OKTOBER Syarat Perjalanan Domestik Tidak Berubah

JAKARTA (KR) - Setelah ditetapkan perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali mulai 21 September sampai 4 Oktober 2021, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan aturan terkait syarat pelaku perjalanan di dalam negeri atau domestik tidak ada perubahan. "Sejalan dengan perpanjangan masa PPKM hingga 4 Oktober 2021, sampai saat ini aturan syarat pelaku perjalanan di dalam negeri tidak ada perubahan, masih sama dengan aturan sebelumnya," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati di Jakarta, Selasa (21/9).

Aturan perjalanan masih merujuk pada SE Satgas Penanganan Covid-19 No 18 Tahun 2021 beserta addendumnya tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19. Serta merujuk pada aturan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 43 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

an Masyarakat Level 3, dan Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali dan Inmendagri Nomor 44 Tahun 2021 Tentang PPKM Covid-19 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua.

Adapun aturan-aturan perjalanan transportasi dalam negeri maupun internasional dari Kemenhub yang berlaku pada masa perpanjangan PPKM Jawa-Bali 21 September-4 Oktober 2021, yaitu SE Kemenhub No 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara, SE Kemenhub No 56 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat, SE Kemenhub No 58 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian, dan SE Kemenhub No 59 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut. (Imd)-d

UNTUK 56 PEGAWAI DIBERHENTIKAN

KPK Siapkan Tunjangan Hari Tua

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan memenuhi hak terhadap 56 pegawai yang diberhentikan dengan hormat untuk mendapatkan tunjangan hari tua. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, tunjangan hari tua itu merupakan dana tunai yang diberikan KPK kepada penasihat dan pegawai sebagai jaminan kesejahteraan pada saat berakhirnya masa tugas (purnatugas).

Pegawai KPK yang berhenti dengan hormat, memang tidak mendapatkan pesangon dan uang pensiun. "Namun, KPK memberikan tunjangan hari tua sebagai pengganti manfaat pensiun," jelas Ali Fikri, Selasa (21/9). Sebelumnya diberitakan, 56 pegawai yang tidak lolos dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang merupakan salah satu rangkaian proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) akan diberhentikan dengan hormat pada 30 September. Diungkapkan Ali, tunjangan hari tua itu merupakan dana tunai yang diberikan KPK kepada penasihat dan pegawai sebagai jaminan kesejahteraan pada saat berakhirnya masa tugas. Termasuk, segala manfaat atau fasilitas lain yang menjadi bagian dari benefit kepesertaan program tunjangan hari tua.

"Mengenai besarnya dalam hal ini ditetapkan KPK dan pengelolaan dilakukan BPJS Ketenagakerjaan serta pihak ketiga yang ditunjuk," kata Ali. Adapun pelaksanaan tunjangan hari tua tersebut, diatur secara rinci melalui Perkom No 2 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Tua Penasihat dan Pegawai serta Keputusan Sekjen KPK No 390 Tahun 2018 tentang Alokasi Iuran Tunjangan Hari Tua untuk Tim Penasihat/Pegawai KPK. Dalam kesempatan itu, Ali menjelaskan tentang besaran iuran tunjangan hari tua tiap bulannya, yaitu senilai 16 persen yang dihitung berdasarkan gaji terdiri 13 persen berasal dari APBN dan 3 persen dari kontribusi pegawai. "Soal iurannya ini dikumpulkan sejak seseorang diangkat menjadi pegawai," jelasnya. Pemenuhan hak keuangan tersebut, kata Ali, sebagai bentuk kepatuhan terhadap perundang-

undangan. Hal ini juga sekaligus merupakan penghargaan atas profesionalitas, jasa dan pengabdian insan KPK selama melaksanakan tugas pemberantasan korupsi di KPK.

Seperti diketahui, KPK memberhentikan dengan hormat 56 pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam TWK per 30 September 2021. TWK merupakan salah satu rangkaian dari proses alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers Rabu lalu mengatakan, KPK menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan dedikasi terhadap 56 pegawai yang akan diberhentikan dengan hormat. Lebih jauh ia menyebutkan, banyak ladang pengabdian yang laik di luar KPK dalam pemberantasan korupsi. (Fu)-f

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers Rabu lalu mengatakan, KPK menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan dedikasi terhadap 56 pegawai yang akan diberhentikan dengan hormat. Lebih jauh ia menyebutkan, banyak ladang pengabdian yang laik di luar KPK dalam pemberantasan korupsi. (Fu)-f

AN Sukses Mendikbudristek Beri Apresiasi

JAKARTA (KR) - Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengapresiasi suksesnya pelaksanaan asesmen nasional (AN) yang berlangsung lancar. Semua tanpa ada kendala teknis, baik itu jaringan maupun perangkat yang digunakan.

Nadiem Makarim mengatakan hal itu setelah meninjau proses vaksinasi peserta didik dan tenaga kependidikan di Korem 042 Garuda Putih Kota Jambi, Selasa (21/9). "Saya senang sekali guru-guru yang melaksanakan survei lingkungan belajar tidak ada tekanan. Para guru tahu, AN ini tidak ada dampak bagi individu guru maupun muridnya. Ini hanya pemetaan sekolah. Tidak perlu persiapan. Jawabnya jujur saja. Semakin jujur semakin bagus, ini untuk perubahan yang baik," terangnya.

Ketika diskusi dengan guru yang melaksanakan AN, Menteri Nadiem kaget, para guru mulai sadar, tugas sebagai guru untuk melitersi adalah membuat siswanya jatuh cinta dengan membaca. "Ini yang saya senang, guru lebih tahu, salah satu tugasnya adalah membuat siswanya jatuh cinta dengan membaca. Itu yang bapak/ibu guru refleksikan ketika melihat anak didiknya mengerjakan soal-soal literasi yang merupakan bagian dari AN," ujar Nadiem.

Nadiem juga menegaskan kembali, AN tidak menimbulkan konsekuensi apapun bagi individu siswa, guru maupun kepala sekolah. AN bertujuan untuk mendorong perubahan positif dalam cara guru mengajar, cara kepala sekolah memimpin pembelajaran di sekolah dalam pengawasan sekolah dan cara pemerintah daerah (pemda) melakukan evaluasi diri dalam penganggaran agar lebih berorientasi pada kualitas pembelajaran. (Ati)-d

TRAH HB II GAGAS PUSAT STUDI

Rendah, Penelitian Naskah Kuno

JAKARTA (KR) - Naskah Jawa Kuno klasik di abad 16-18 merupakan salah satu aset nasional yang berisi tentang pengetahuan budaya yang mayoritas masyarakat lokal. Hingga saat ini penelitian dan informasi tentang naskah kuno itu sendiri masih rendah karena kurangnya orang yang berkecimpung dalam hal ini.

Keberadaan naskah kuno saat ini tersebar di masyarakat, museum-museum, maupun perpustakaan nasional. Namun saat ini kondisi dari naskah Jawa kuno klasik yang tersebar di masyarakat dalam keadaan rusak dan tidak terpelihara dengan baik.

Banyak naskah naskah Jawa kuno klasik di Indonesia yang saat ini masih banyak yang belum diketahui lokasi pastinya. Beberapa bahkan berada di negara lain seperti Belanda, Prancis, Jepang, dan Inggris.

"Iya di Belanda juga ada tapi bentuknya bukan naskah kuno, di sana lebih ke klasik. Kalau yang kuno itu ada di London, dan belum diteliti. Salah satunya, Kangjeng Kyai Serat Suryorojo digubah Sultan Hamengku Buwono II yang memaparkan

masalah Pedoman Kenegaraan untuk Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang diuraikan dalam bentuk naratif viracarita," ujar Fajar Bagoes Poetranto Trah Sultan Hamengku Buwono II dalam keterangan persnya, Selasa (21/9).

Bagoes berencana menggandeng Rumah Studi Jawa Makaradhwaja mengembangkan Pusat Skriptorium naskah naskah klasik kuno dari abad 16 sampai dengan abad 18 rencana pembelajaran akan digelar secara umum dalam waktu dekat.

Sementara itu, Ahli Filologi UGM, KRT Manu J Widyaseputra, mengatakan naskah-naskah yang akan dipelajari dan diterjemahkan antara lain Serat Keramat Kangjeng Kyai Suryorojo, Babad Sepe, Babad Segaluh, Babad Sengkala, Babad Giyanti Brangtakusuman, Serat Arjunawijaya, Serat Ramabadra Jawi, Serat Beksan Menak Mangkarawaten, Serat Srimpi Jemparingan, Babad Sengkala, Serat Bedhaya Tunjung Anom, Serat Arjunawijaya, Serat Ramabadra Jawi, Serat Beksan Menak Mangkarawaten, Serat Srimpi Jemparingan. (Ati)-f

ORTU MENINGGAL TERKENA COVID-19

1.734 Anak di DIY Jadi Yatim

YOGYA (KR) - Kematian akibat serangan Covid-19 menimbulkan duka bagi para anak-anak karena ditinggal orangtuanya. Dari hasil pendataan Dinas Sosial DIY, terdapat 1.734 anak yatim, piatu dan yatim piatu di DIY.

"Mereka saat ini tersebar di sejumlah tempat. Sejauh ini dalam pengasuhan keluarganya," ungkap Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih SH MSi kepada KR, Selasa (21/9) ketika ditanyakan perkembangan anak-anak yang ditinggal orangtuanya akibat Covid-19.

Dikemukakan Endang, untuk pengasuhan bagi mereka, akan lebih baik jika ada keluarga yang mengasuhnya langsung. Dengan kedekatan keluarga, maka pola pengasuhan, termasuk soal pendidikan lebih baik. Namun demikian, jika mereka tidak punya ke-

uarga lagi, baik itu kakek dan nenek, paman dan bibiknya, atau kakaknya, maka Dinas Sosial akan merekomendasikan untuk diasuh di Balai Rehabilitasi Sosial Perlindungan Anak (BRSPA). Untuk saat ini, balai tersebut yang dikelola Dinas Sosial DIY berada di dua tempat, yakni di Bimomartani Sleman dan di Gunungkidul.

"Jika anak masih ada keluarga, akan lebih baik diasuh oleh keluarga sendiri. Sehingga tidak perlu dibawa ke panti ataupun ke BRSPA. Nenek, kakek atau siapapun dalam keluarga punya kedekatan dengan orangtuanya. Sehingga bisa menggantikan peran orangtua mereka sebelumnya," ujar Endang.

Terhadap 1.734 anak yang ditinggal orangtuanya ini, Dinas Sosial DIY saat ini sedang memproses pengajuan anggaran dana untuk santunan pada mereka selama 4 bu-

lan, mulai bulan September 2021. Diharapkan pengajuan anggaran ini bisa disetujui dan direalisasi. "Saat ini pengajuan melalui perubahan anggaran APBD 2021 sedang berproses," ujar Endang.

Dana tersebut sebagai ungkapan rasa duka pemerintah daerah terhadap mereka yang ditinggal orang tua. Diharapkan dana santunan itu bisa dimanfaatkan dengan baik.

Mengenai pendidikan, sejauh ini pemerintah telah memiliki program BOS dan juga program bantuan pendidikan lainnya. Karena itu, mereka diharapkan telah mendapat bantuan tersebut.

"Kami berharap pendidikan mereka terus berlanjut. Dan tidak ada yang putus sekolah. Sedangkan pihak keluarga mengasuhkan, hendaknya juga memperhatikan," ujarnya. (Jon)-d

ANTISIPASI GELOMBANG KETIGA COVID-19

Cegah Varian Baru, Pintu Masuk Dibatasi

JAKARTA (KR) - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, untuk mencegah potensi masuknya varian baru virus Corona seperti varian Mu dan Lambda, Pemerintah membatasi dan memperketat kedatangan warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) dari luar negeri, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara.

"Kita tidak juga ingin kecolongan meluasnya varian baru seperti Mu dan Lambda masuk ke Indonesia. Karena itu, untuk mencegah hal itu terjadi, Pemerintah akan membatasi pintu masuk perjalanan internasional ke Indonesia dan memperketat proses karantina bagi warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri," tegas Luhut di Jakarta, Selasa (21/9).

Untuk jalur udara, lanjut Menko Marves, Pemerintah hanya membuka pintu masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten dan Bandara Sam Ratulangi di Manado, Sulawesi Utara. Sedangkan untuk jalur laut, pintu masuk hanya melalui Batam dan Tanjungpinang di Kepulauan Riau. Kemudian untuk jalur darat pintu masuk hanya melalui Aruk dan Entikong di Kalimantan Barat, Nunukan di

Kalimantan Utara, dan Motaain di Nusa Tenggara Timur.

TNI dan Polri akan ditugaskan untuk melakukan peningkatan pengawasan di jalur-jalur tikus, baik di darat maupun laut, yang jumlahnya bisa beberapa ratus, ungkapnya.

"Pemerintah mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengantisipasi gelombang ketiga Covid-19, seiring meningkatnya kasus di beberapa negara tetangga, seperti Filipina, Malaysia, dan Singapura," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Menkominfo menjelaskan, berdasarkan penelitian 'Multiwave Pandemic Dynamics Explained: How to Tame The Next Wave of Infectious Diseases' dalam jurnal Scientific Reports, gelombang baru Covid-19 tidak dapat dihindari. Yang dapat dilakukan adalah memperlambat terjadinya gelombang baru dengan mengendalikannya jumlah kasus ketika berada di level rendah. Hal ini harus diiringi peningkatan intervensi farmasi seperti vaksinasi.

Menurut Menkominfo, hingga Senin (20/9) jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia di angka 55.936 dengan penambahan kasus harian 1.932. (Sim/San)-d

GELAR IDACON V-2021

UIN Partisipasi Penanganan Global Covid-19



KR-Juvinartato

Dekan 1 FDK UIN Sunan Kalijaga Yogya menyerahkan cenderamata diterima Dirut KR, Senin (20/9).

YOGYA (KR) - Dua tahun pandemi Covid-19 berdampak global dan multi-sektoral sehingga perlu pemecahan bersama. Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogya siap menggelar program tahunan International Dakwah Conference (IDACON), 23-24 September 2021.

"Tahun ini merupakan IDACON ke-5, mengumpulkan pakar, peneliti mau-

pun praktisi dari luar maupun dalam negeri untuk mengeksplorasi isu-isu klasik dan kontemporer dan bagaimana konstruksinya bagi perkembangan keilmuan dan peradaban," tutur Wakil Dekan 1 FDK UIN Dr Musthofa MSi saat silaturahmi ke jajaran Direksi KR, Senin (20/9).

Didampingi Wakil Dekan 3 FDK UIN Dr Pajar Hatma MSi, Ketua International Office FDK UIN Andayani

MSW, Ketua Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah Dra Evi Septiani TH MSi, dan mahasiswa Ketua Suka TV Imanuddin Rahmat Arifin, rombongan disambut Dirut KR M Wirmon Samawi SE MIB, Komisaris Utama Prof Dr Inajati Adrisijanti, Direktur Keuangan Imam Satriadi SH, Direktur Produksi Baskoro Jati Prabowo SSos dan Wapemred KR Drs H Ahmad Luthfie MA

"IDACON 2021 mengangkat tema 'The Global Impact of Covid-19 Pandemic, Actions and Future Recommendations' untuk mengeksplorasi bagaimana dampak global dari pandemi, penanganan dan rekomendasi," jelas Musthofa.

Tema ini akan dikaji lintas keilmuan dengan mengundang para teoretisi dan praktisi dari keilmuan sosial dan dakwah. "Keynote speech Menteri Sosial Dr (HC) Ir Tri Rismaharini MT dilanjutkan seminar internasional dengan 5 pembicara luar negeri dan 4 pembicara lokal. Acara online (zoom) tanpa dipungut biaya. Pendaftaran melalui link <http://bit.ly/IDACON2021> dengan target minimal 500 peserta dari dalam dan luar negeri," jelasnya. (Vin)-f